

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Di era digital yang kian massif seperti saat ini, internet menjadi pisau bermata dua. Adanya perkembangan teknologi menimbulkan ancaman baru yang dapat membahayakan anak-anak jika tidak digunakan secara bijak.<sup>1</sup> Salah satu ancaman yang kerap terjadi adalah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA), yaitu pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak melalui internet atau media sosial.<sup>2</sup> OCSEA juga merupakan masalah yang dapat berdampak pada anak-anak di seluruh dunia karena mencakup berbagai jenis kekerasan dan eksploitasi anak, seperti *sexting*<sup>3</sup>, pemerasan seksual (*sexortion*)<sup>4</sup>, *online grooming*<sup>5</sup>, penyalahgunaan siaran langsung<sup>6</sup>, perundungan siber, serta produksi dan distribusi materi eksploitasi seksual anak.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> *Global Status Report On Preventing Violence Against Children 2020*, 1st Ed (World Health Organization, 2020).

<sup>2</sup> Sana Ali Dkk., "Child Sexual Abuse And The Internet—A Systematic Review," *Human Arenas* 6, No. 2 (2023): 404–21, <https://doi.org/10.1007/S42087-021-00228-9>.

<sup>3</sup> Mengirimkan Pesan, Foto, Atau Video Seksual Secara Daring.

<sup>4</sup> Pemerasan Seksual Dimana Pelaku Mengancam Korban Dengan Menyebarkan Gambar Atau Video Pribadi Untuk Memaksa Korban Memenuhi Tuntutan Pelaku.

<sup>5</sup> Proses Manipulasi Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa (Atau Pihak Lebih Tua) Untuk Membangun Kepercayaan Anak Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual, Emosional, Atau Psikologis Secara Online.

<sup>6</sup> Pelecehan Seksual Secara Real Time Melalui Aplikasi Streaming, Yang Terkadang Direkam Dan Diunggah Kembali Ke Sosial Media.

<sup>7</sup> Tisna Syafnita, "Analisis Tingkat Pemahaman Orang Tua Dalam Kesadaran Penggunaan Media Sosial Yang Berdampak Terhadap Kejahatan Dan Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, No. 2 (2023): 634–45.

Kejahatan ini tidak hanya merampas hak-hak dasar anak tetapi juga menjadi penghambat serius dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), khususnya Tujuan 16.2 yang berkomitmen untuk mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.<sup>8</sup>

Fenomena OCSEA semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya akses teknologi di masyarakat. Secara global, OCSEA telah mencapai tahap epidemik dan berdampak luas terhadap anak-anak.<sup>9</sup> Menurut laporan *Disrupting Harm*<sup>10</sup> UNICEF, oleh International Criminal Police Organization (Interpol), dan oleh End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) tahun 2022, sekitar 2% anak-anak di Asia Tenggara yang menggunakan internet berusia 12-17 tahun di Indonesia menjadi target OCSEA. Ini termasuk dipaksa melakukan aktivitas seksual, berbagi gambar seksual tanpa persetujuan, atau dipaksa melakukan tindakan seksual melalui janji uang atau hadiah.<sup>11</sup> Data serupa dari Internet Watch Foundation (IWF) tahun 2022, ditemukan lebih dari 250.000 URL konten eksploitasi seksual anak yang terverifikasi secara daring, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>12</sup>

Di Filipina, lebih dari 80% kasus eksploitasi seksual anak dilaporkan terjadi secara online. WeProtect Global Alliance menyatakan OCSEA adalah masalah

---

<sup>8</sup> Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development | Department Of Economic And Social Affairs, Diakses 22 November 2025, <https://Sdgs.Un.Org/2030agenda>.

<sup>9</sup> Kemal Veli Açar, "Organizational Aspect Of The Global Fight Against Online Child Sexual Abuse," *Global Policy* 8, No. 2 (2017): 259–62.

<sup>10</sup> Inisiatif Global Yang Dikembangkan Melalui Kerja Sama Antara UNICEF, ECPAT International, Dan INTERPOL, Yang Berfokus Pada Upaya Memahami Dan Menanggulangi OCSEA.

<sup>11</sup> DH-Indonesia-Report-2022, T.T.

<sup>12</sup> IWF-Annual-Report-2022\_FINAL, T.T.

serius yang terus meningkat di seluruh dunia. Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa lebih dari 1,1 juta laporan terkait OCSEA masuk ke platform CyberTipline milik National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pada tahun 2020, meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Kecepatan penyebaran informasi dan sifat anonim dari ruang digital menjadikan anak-anak semakin rentan terhadap predator seksual yang memanfaatkan celah hukum dan kurangnya pengawasan lintas sektor.<sup>13</sup>

Indonesia tidak terlepas dari masalah ini. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 150 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan di ranah daring menjadi salah satu kategori yang terus meningkat.<sup>14</sup> Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih kuat diperlukan. Temuan ini diperkuat oleh laporan *Disrupting Harm* oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), Interpol, dan ECPAT yang menyebutkan bahwa antara 17% hingga 56% anak di Indonesia mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan online serta pengalaman yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Kota Surabaya tidak kebal dari OCSEA. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Surabaya menunjukkan dinamika kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi dan fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat

---

<sup>13</sup> Prianter Jaya Hairi Dan Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum* 14, No. 2 (2023): 163–79.

<sup>14</sup> Rizca Yunike Putri Dkk., "Mewujudkan Kota Layak Anak Melalui Program Kolaborasi Guru, Orang Tua Dan Pengasuh (Kogurupa) Di Kota Surabaya," *Prosiding Seminar Nasional Kusuma 2* (2024): 222–29.

<sup>15</sup> DH-Indonesia-Report-2022.

116 kasus, 2021 tercatat 125 kasus kekerasan terhadap anak, meningkat menjadi 154 pada tahun 2022, dan mencapai 147 kasus hingga Oktober 2023.<sup>16</sup>

Meskipun data tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dan non-KDRT, sebagian kasus diantaranya berkaitan dengan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis online, seiring meningkatnya penggunaan teknologi oleh anak-anak.<sup>17</sup> Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti layanan hotline yang terintegrasi dengan layanan nasional SAPA 129 milik KemenPPA mulai tahun 2023, pos curhat online 24 jam sejak 2016, program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA) dimulai tahun 2023, penyuluhan-penyuluhan dan layanan konseling, serta layanan fasilitator Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sejak tahun 2017.<sup>18</sup>

Namun demikian, kompleksitas OCSEA sebagai isu lintas batas menunjukkan bahwa upaya di tingkat lokal saja tidak selalu memadai, sehingga membuka ruang bagi keterlibatan aktor internasional dalam mendukung kebijakan dan program perlindungan anak di daerah. Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan peran aktif dengan berpartisipasi dalam program tersebut, meskipun secara

---

<sup>16</sup> Faizul Amalia Nova Dan Ananta Prathama, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya," *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No. 1 (2023): 231–43, <https://doi.org/10.52423/Neores.V5i1.118>.

<sup>17</sup> Alvina Dewi Hafzari, "Policy Output Analysis Pada Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Melalui Layanan Puspaga Di Surabaya," *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 11, No. 2 (2023): 104, <https://doi.org/10.31764/Jiap.V11i2.14045>.

<sup>18</sup> Eva Rachmawati Dkk., "Pengaruh Self Leadership, Kecerdasan Sosial, Employee Ability Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kinerja Karyawan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya," *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 5, No. 02 (2018).

administratif kerja sama UNICEF di Indonesia berada dalam kerangka nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).<sup>19</sup>

Hal ini mencerminkan adanya peran otonom pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan agenda global di tingkat lokal, khususnya dalam isu perlindungan anak. Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif paradiplomasi, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam kerja sama internasional untuk mencapai kepentingan lokal, tanpa keluar dari kerangka kebijakan luar negeri nasional.<sup>20</sup> Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan jejaring global UNICEF untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak dan mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas praktik paradiplomasi pemerintah daerah maupun isu perlindungan anak di ranah digital, kajian yang secara spesifik menghubungkan kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi internasional dalam konteks penanganan OCSEA masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

---

<sup>19</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Diakses 4 Desember 2025, <https://Surabaya.Go.Id/Id/Berita/22971/Surabaya-Officially-Becomes-A-Unicef-Accredited-Child-Friendly-City>.

<sup>20</sup> Roseno Aji Affandi Dan Putri Utami, "Global Sustainable Challenges, Local Solutions: Paradiplomacy And Waste Management In Cirebon," *E3S Web Of Conferences* 594 (2024): 02003, <https://doi.org/10.1051/E3sconf/202459402003>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, memunculkan sebuah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana praktik paradiplomasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam upaya menangani kekerasan anak di ranah daring (OCSEA)?”.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam mengimplementasikan program penanganan kekerasan anak di ranah daring (OCSEA). Melalui pendekatan paradiplomasi, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan organisasi internasional berinteraksi dalam membangun mekanisme kolaboratif lintas level pemerintahan dan lintas sektor untuk menangani kekerasan anak di ruang digital.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya terkait praktik paradiplomasi pemerintah daerah dalam kerja sama dengan organisasi internasional. Secara lebih spesifik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani isu keamanan non-tradisional, terutama dalam kerangka *human security*, seperti perlindungan anak di ranah digital. Isu perlindungan anak di ruang digital, termasuk OCSEA,

merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia di era digital yang bersifat lintas batas. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kerja sama subnasional, perlindungan anak, serta peran organisasi internasional dalam konteks lokal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai praktik kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring (OCSEA). Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya DP3APPKB dan instansi terkait, dalam meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengembangkan kerja sama serupa dengan organisasi internasional dalam upaya perlindungan anak di era digital.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mengkaji penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik sebagai bahan pertimbangan dan referensi. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mukti (2021) berjudul “*From Local to Global: Surabaya’s Paradiplomacy Strategy in Realising Child-Friendly City*”<sup>21</sup> membahas strategi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kota layak anak melalui kerja sama internasional.

---

<sup>21</sup> Muhammad Fajhriyadi Hastira Dkk., *FROM LOCAL TO GLOBAL: SURABAYA’S PARADIPLMACY STRATEGY IN REALISING A CHILD-FRIENDLY CITY*, T.T.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis bentuk, aktor, serta kepentingan paradiplomasi yang dijalankan oleh pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya secara aktif memanfaatkan jejaring internasional, termasuk kerja sama dengan organisasi internasional, untuk memperkuat kapasitas lokal dalam pemenuhan hak anak dan pembangunan kota ramah anak.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2025) berjudul *“Paradiplomacy of the Global South: Surabaya’s Approach to Global Sustainability Challenges (2016-2020)”*<sup>22</sup> mengkaji peran paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi tantangan keberlanjutan global melalui kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi paradiplomasi Surabaya, khususnya dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan program pembangunan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan kerja sama internasional, terutama melalui kemitraan kota kembar (*sister city*), untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam isu lingkungan, pembangunan perkotaan, dan keberlanjutan, meskipun menghadapi keterbatasan institusional akibat kerangka desentralisasi di Indonesia.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Azkiya, Putri, Andriana, dan Pradana (2025) berjudul *“Analisis Kerja Sama Sister City antara Surabaya*

---

<sup>22</sup> Ario Bimo Utomo, “PARADIPLOMACY OF THE GLOBAL SOUTH: SURABAYA’S APPROACH TO GLOBAL SUSTAINABILITY CHALLENGES (2016-2020),” *JANUS NET E-Journal Of International Relation* 16, No. N<sup>o</sup>1 (2025), <https://doi.org/10.26619/1647-7251.16.1.16>.

**dan Liverpool dalam Perspektif Pembangunan Daerah”<sup>23</sup>** mengkaji praktik paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya melalui kerja sama *Sister City* dengan Kota Liverpool dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis implementasi program, manfaat, serta tantangan kerja sama lintas kota, khususnya di sektor pendidikan inklusif dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Surabaya-Liverpool berkontribusi terhadap inovasi kebijakan, transformasi kelembagaan, serta penguatan tata kelola kota yang partisipatif melalui pertukaran pelajar, pelatihan guru, dan adopsi praktik tata kelola dari kota mitra,

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kedhaton, K., & Adzmy, M.F. (2024) berjudul **“Paradiplomasi dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth (PtY) 2021-2023”<sup>24</sup>**. Penelitian ini menganalisis praktik kerja sama internasional antara Pemerintah Kabupaten Jember dan lembaga nonpemerintah asal Belanda, Rutgers WPF, dalam pelaksanaan program Power to Youth (PtY) yang berfokus pada pemberdayaan Perempuan muda dan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah bukan aktor utama dalam diplomasi luar negeri, pemerintah daerah mampu menjalankan

---

<sup>23</sup> Marshella Minda Azkiya Dkk., *ANALISIS KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA SURABAYA DAN LIVERPOOL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH*, T.T.

<sup>24</sup> Khurin Kedhaton Dan Muhammad Fadzryl Adzmy, “Paradiplomasi Dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember Dan Rutgers WPF Melalui Program Power To Youth (Pty) 2021-2023 [Paradiplomacy In Gender Equality Issues: Collaboration Between Jember Regency Government And Rutgers WPF],” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 15, No. 1 (2024): 81–102, <https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4358>.

peran penting dalam mengimplementasikan agenda global di tingkat lokal melalui kemitraan berbasis isu. Penulis menemukan bahwa kerja sama ini berkontribusi pada penguatan kebijakan daerah yang responsif gender dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh More dan Kurniawati (2022) berjudul **“Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak”**,<sup>25</sup> membahas praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani permasalahan sosial anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi untuk menganalisis peran UNICEF serta strategi pemerintah daerah dalam penguatan sistem perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan UNICEF melalui pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) serta pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) memberikan dampak positif terhadap penurunan kasus permasalahan sosial anak dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.

Penelitian keenam, penelitian yang dilakukan oleh Shorea Helminasari, Helnisa, dan Kurniawati Pasulle (2023) berjudul **“Peningkatan Kesadaran Publik terhadap Fenomena Sosial Sexting sebagai Kasus Kekerasan dan Pelecehan**

---

<sup>25</sup> Aurora Aziza More Dan Dyah Estu Kurniawati, “Analisis Paradiplomasi Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung Dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, No. 2 (2022): 407–20, <https://doi.org/10.35326/Pencerah.V8i2.2213>.

**Seksual Anak Berbasis Gender Online di Kota Samarinda”<sup>26</sup>**. Penelitian ini berfokus pada fenomena *sexting* sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual anak berbasis daring, serta upaya peningkatan kesadaran publik melalui kegiatan edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap *sexting* sebagai bagian dari kekerasan seksual anak berbasis gender online, meskipun masih ditemukan kendala berupa rendahnya pelaporan kasus dan keterbatasan akses informasi layanan bagi korban.

Penelitian ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati M dan Najamuddin Khairur Rijal (2022) berjudul **“Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina”<sup>27</sup>**. Membahas secara mendalam mengenai peran jaringan advokasi non-negara bernama Child Rights Network (CRN) dalam menekan angka eksploitasi seksual anak secara *online* di Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka konsep *Transnational Advocacy Network* dan pola *boomerang*, untuk menganalisis bagaimana strategi CRN melalui kampanye #ShutdownOCSEA, advokasi kebijakan, dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF berhasil mendorong pengesahan Republic Act No. 11930 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap OCSEA. Hasil dari penelitian

---

<sup>26</sup> Shorea Helminasari Dkk., “Peningkatan Kesadaran Publik Terhadap Fenomena Sosial Sexting Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda,” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.128>.

<sup>27</sup> Melinda Trisnawati Dan Najamuddin Khairur Rijal, “Strategi Child Right Network Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online Terhadap Anak Di Filipina,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, No. 3 (2022): 683–93, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2360>.

ini menunjukkan bahwa aktor non-negara mampu memainkan peran signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan nasional, terutama ketika negara menghadapi keterbatasan internal.

Penelitian kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Tristantri, C. N. (2024) yang berjudul **“Peran USAID Melalui program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Paradiplomasi”**.<sup>28</sup> Tristantri meneliti kerja sama antara USAID dan Pemerintah Kota Probolinggo melalui program IUWASH-PLUS dalam sektor penyediaan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kerja sama internasional seperti ini dapat dikategorikan sebagai paradiplomasi teknis karena melibatkan transfer pengetahuan, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Hasilnya menegaskan bahwa paradiplomasi tidak selalu berwujud hubungan formal seperti *sister city*, melainkan juga bisa melalui kerja sama pembangunan.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/Jenis Penelitian	Hasil
1.	<i>From Local to Global: Surabaya's Paradiplomacy Strategy in Realising a Child-Friendly City</i>  Oleh: Putri & Mukti (2021)	Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus	Pemerintah Kota Surabaya menjalankan strategi paradiplomasi dengan memanfaatkan jejaring internasional dan kerja sama dengan organisasi internasional untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mewujudkan kota layak anak dan pemenuhan hak anak. Namun penelitian ini belum secara khusus membahas kemitraan

<sup>28</sup> Tristantri, C. N. (2024). Peran USAID Melalui Program IUWASH-PLUS Di Kota Probolinggo Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Paradiplomasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 15(1), 103-124.

			Pemerintah Kota Surabaya dengan UNICEF dalam menangani kekerasan seksual anak di ranah daring (OCSEA).
2.	<i>Paradiplomacy of the Global South: Surabaya's Approach to Global Sustainability Challenges (2016-2020)</i>  Oleh: Utomo (2025)	Kualitatif dengan metode studi kasus	Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan kerja sama internasional, terutama sister city, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam menghadapi tantangan keberlanjutan dan implementasi SDGs. Penelitian ini belum membahas peran UNICEF maupun isu perlindungan anak di ranah daring.
3.	Analisis Kerja Sama <i>Sister City</i> antara Surabaya dan Liverpool dalam Perspektif Pembangunan Daerah  Oleh: Azkiya, Putri, Andriana, & Pradana (2025)	Kualitatif dengan studi literatur	Kerja sama Surabaya–Liverpool berkontribusi terhadap inovasi kebijakan, penguatan tata kelola kota, pendidikan inklusif, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pertukaran pelajar dan pelatihan guru. Penelitian ini belum membahas kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF.
4.	Paradiplomasi dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program <i>Power to Youth</i> (PtY) 2021-2023  Oleh: Kedhaton & Adzmy (2024)	Kualitatif dengan studi kasus	Pemerintah daerah mampu mengimplementasikan agenda global melalui kemitraan dengan organisasi internasional. Program PtY berkontribusi pada kebijakan responsif gender dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan regulasi.
5.	Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan UNICEF dalam Menangani	Kualitatif deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi	Kerja sama Tulungagung–UNICEF melalui ULT PSAI dan program Kabupaten Layak Anak meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membantu menurunkan permasalahan sosial anak. Namun penelitian ini belum

	<p>Permasalahan Sosial Anak</p> <p>Oleh:          More &amp; Kurniawati (2022)</p>		<p>secara khusus membahas OCSEA maupun konteks kota besar seperti Surabaya.</p>
6.	<p>Peningkatan Kesadaran Publik terhadap Fenomena <i>Social Sexting</i> sebagai Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online di Kota Samarinda</p> <p>Oleh:          Helminasari, Helnisa, &amp; Pasulle (2023)</p>	<p>Kualitatif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Edukasi melalui penyuluhan, sosialisasi, dan diskusi interaktif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sexting sebagai bentuk kekerasan seksual anak berbasis daring, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaporan kasus dan akses layanan korban.</p>
7.	<p>Strategi <i>Child Right Network</i> dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina</p> <p>Oleh:          Trisnawati &amp; Rijal (2022)</p>	<p>Kualitatif deskriptif dengan konsep <i>Transnasional Advocacy Network</i> dan <i>boomerang pattern</i></p>	<p>Jaringan advokasi CRN berhasil mendorong pengesahan Republic Act No.11930 melalui kampanye #ShutdownOCSEA, advokasi kebijakan, dan kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, menunjukkan peran kuat aktor non-negara dalam perubahan kebijakan.</p>
8.	<p>Peran USAID melalui Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Paradiplomasi</p> <p>Oleh:          Tristantri (2024)</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Kerja sama USAID dan Pemerintah Kota Probolinggo dalam program IUWASH-PLUS menunjukkan bentuk paradiplomasi teknis melalui transfer pengetahuan, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas SDM di sektor air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi juga dapat berbentuk kerja sama pembangunan.</p>

## 1.5 Kerangka Teori: Paradiplomasi

Secara etimologis, istilah paradiplomasi berasal dari bahasa Yunani: “*para*” yang berarti “di samping”, “dekat”, atau “berdampingan”. Dalam kajian hubungan internasional, paradiplomasi merujuk pada keterlibatan langsung aktor subnasional, seperti pemerintah daerah, dalam aktivitas hubungan internasional yang berjalan berdampingan dengan diplomasi negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara, tetapi juga melibatkan aktor di bawahnya yang memiliki kepentingan langsung terhadap isu-isu global.

Alexander S. Kuznetsov dalam bukunya *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, mendefinisikan paradiplomasi sebagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah subnasional dengan aktor internasional, baik negara maupun nonnegara, untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik.<sup>29</sup>

Kuznetsov menekankan bahwa paradiplomasi tidak hanya terjadi dalam negara federal, tetapi juga relevan dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah dipahami sebagai bagian dari struktur negara yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi secara internasional, meskipun tidak memiliki kedaulatan penuh. Kuznetsov memperkenalkan konsep *ambivalent actorness*, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah memiliki sifat menyerupai negara (*state-like*)<sup>30</sup>, namun tetap berada dalam batas kewenangan sebagai aktor non-sovereign. Posisi ini

---

<sup>29</sup> Alexander Kuznetsov, *Theory And Practice Of Paradiplomacy*, 0 Ed. (Routledge, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315817088>.

<sup>30</sup> Karakter Pemerintah Subnasional Yang Memiliki Kapasitas Menyerupai Negara Dalam Hal Pengambilan Kebijakan Dan Interaksi Internasional, Namun Tetap Berada Dalam Batas Kewenangan Sebagai Aktor Non-Sovereign

menempatkan pemerintah daerah pada level menengah (*meso-level*)<sup>31</sup>, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan aktor internasional dalam isu-isu tertentu.<sup>32</sup>

Perkembangan paradiplomasi juga tidak terlepas dari perubahan karakter isu dalam hubungan internasional. Kuznetsov menjelaskan bahwa meningkatnya kompleksitas globalisasi telah mendorong munculnya fenomena *perforated sovereignty*, yaitu kondisi di mana batas antara urusan domestik dan internasional menjadi semakin kabur. Isu-isu yang sebelumnya dianggap sebagai ranah domestik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, kini memiliki dimensi global dan dikategorikan sebagai isu *low politics*<sup>33</sup> yang memerlukan keterlibatan berbagai aktor lintas negara.

Selanjutnya, Kuznetsov menjelaskan bahwa paradiplomasi dapat dipahami melalui berbagai dimensi yang mencerminkan kompleksitas keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional. Salah satu dimensi yang relevan adalah dimensi Hubungan Internasional (*International Relations dimension*).<sup>34</sup> Dimensi ini mengacu pada aspek paradiplomasi yang melibatkan interaksi, negosiasi, dan keterlibatan antara entitas subnasional dengan berbagai aktor di tingkat internasional, baik pemerintah asing, organisasi internasional, maupun entitas subnasional dari negara lain. Pemerintah daerah dipahami tidak

---

<sup>31</sup> Posisi Pemerintah Daerah Yang Berada Di Tingkat Nasional (Negara) Dan Internasional, Sehingga Memungkinkan Mereka Berinteraksi Langsung Dengan Aktor Internasional Tanpa Memiliki Kedaulatan Penuh Seperti Negara

<sup>32</sup> Alexander S. Kuznetsov, *Theory And Practice Of Paradiplomacy: Subnational Governments In International Affairs*, Routledge New Diplomacy Studies (Routledge, 2015).

<sup>33</sup> Isu-Isu Non-Keamanan Seperti Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesejahteraan, Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan Kedaulatan Negara, Namun Tetap Strategis Dalam Hubungan Internasional

<sup>34</sup> A. S. Kuznetsov, *Theory And Practice Of Paradiplomacy*.

hanya sebagai pelaksana kebijakan domestik, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membangun dan mengelola hubungan lintas negara.

Di sisi lain, Rodrigo Tavares dalam bukunya *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players* memberikan penekanan yang lebih eksplisit pada peran praktis paradiplomasi dalam konteks pemerintah daerah. Tavares menjelaskan bahwa paradiplomasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas hubungan luar negeri, tetapi juga merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Tavares, salah satu tujuan utama paradiplomasi adalah *provide citizen services*, yaitu upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan kerja sama internasional untuk memperoleh sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kemudian paradiplomasi dipahami sebagai praktik yang bersifat pragmatis dan fungsional, karena berorientasi pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.<sup>36</sup>

Tavares menekankan bahwa daerah memiliki posisi yang unik dalam sistem pemerintahan karena kedekatannya dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan lokal dan merancang kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Dalam kerangka ini, paradiplomasi memiliki karakter *janus-faced*, yaitu menghadap keluar untuk

---

<sup>35</sup> Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy: Cities And States As Global Players* (Oxford University Press, 2016).

<sup>36</sup> *Ibid.*

membangun kemitraan internasional, sekaligus menghadap ke dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>

Tavares kemudian mengklasifikasikan paradiplomasi ke dalam beberapa bentuk:

1. *Ceremonial paradiplomacy*, merujuk pada aktivitas paradiplomasi yang bersifat simbolik dan formal, seperti kunjungan resmi atau penandatanganan kerja sama, tanpa fokus pada implementasi kebijakan yang mendalam.
2. *Single-themed paradiplomacy*, yaitu kerja sama internasional yang difokuskan pada implementasi kebijakan mendalam.
3. *Global paradiplomacy*, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam jaringan kerja sama lintas level dengan aktor internasional untuk menangani isu global yang kompleks.
4. *Sovereignty paradiplomacy*, yaitu bentuk paradiplomasi yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan politik atau identitas wilayah dalam konteks hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi Kuznetsov sebagai kerangka utama untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai aktor subnasional dalam menjalin kerja sama internasional. Sementara perspektif Tavares digunakan sebagai pelengkap untuk memahami fungsi paradiplomasi sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik dan penyelesaian masalah lokal melalui pemanfaatan kemitraan, sumber daya, dan keahlian

---

<sup>37</sup> Tavares, *Paradiplomacy*.

internasional untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, mengatasi isu global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam suatu fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri dan menjelaskan praktik kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam menangani isu OCSEA, serta bagaimana praktik kerja sama tersebut dijalankan melalui perspektif paradiplomasi.

Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fenomena sosial yang diteliti. Nazir menjelaskan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara akurat objek, kondisi, atau peristiwa tertentu dengan tujuan menghasilkan deskripsi yang logis dan sesuai dengan fakta yang ada.<sup>38</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik, dengan menekankan makna, proses, dan konteks daripada pengukuran angka.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 1985), [https://books.google.co.id/books?id=M\\_-Daqaacaaj](https://books.google.co.id/books?id=M_-Daqaacaaj).

<sup>39</sup> Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013.

### 1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, laporan kebijakan, publikasi lembaga internasional, serta hasil wawancara dan sumber pendukung lainnya, guna memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika hubungan antaraktor, bukan pada pengukuran kuantitatif atau perhitungan statistik.<sup>40</sup>

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian, kemudian menafsirkannya menggunakan kerangka teori paradiplomasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi praktik kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam menangani isu OCSEA. Melalui proses ini, peneliti berupaya memahami bagaimana praktik paradiplomasi dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, serta bagaimana kerja sama tersebut diimplementasikan dalam konteks perlindungan anak di tingkat kota.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan antar

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

data.<sup>41</sup> Model analisis ini sejalan dengan tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>42</sup> Dengan menggunakan metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai praktik kemitraan paradiplomasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam upaya penanganan OCSEA.

### 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk membatasi pembahasan agar tetap fokus dan tidak melebar dari tujuan penelitian. Secara materiil, penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dan proses kemitraan dengan lembaga pembangunan internasional, khususnya kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam menangani isu OCSEA. Fokus analisis diarahkan pada praktik kemitraan yang dijalankan dalam kerangka paradiplomasi, bukan pada pengukuran dampak kuantitatif atau evaluasi luaran kebijakan secara statistik.

Secara spasial, penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya sebagai unit analisis utama, mengingat Surabaya merupakan salah satu kota yang secara aktif terlibat dalam kerja sama dengan UNICEF dan berbagai kegiatan perlindungan anak berbasis kota. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada posisi Surabaya sebagai kota metropolitan yang menghadapi tantangan nyata terkait kekerasan anak di ranah daring. Secara temporal, penelitian ini mencakup periode 2021 hingga saat

---

<sup>41</sup> Feny Rita Fiantika Dkk., "Metodologi Penelitian Kualitatif," Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

<sup>42</sup> Matthew B. Miles Dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (SAGE Publications, Inc, 2014).

penelitian dilakukan dan menyesuaikan ketersediaan data penelitian dengan merujuk pada dinamika kerja sama dalam kerangka CPAP 2021-2025.

#### **1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara dan studi pustaka. Kedua teknik ini digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai dinamika paradiplomasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam menangani isu OCSEA. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja sama.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pertanyaan umum, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pandangan, pengalaman, dan peran mereka secara lebih luas. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan implementasi kemitraan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pihak dari DP3APPKB Kota Surabaya yang terlibat dalam program perlindungan anak.

Selain data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi pustaka. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen resmi UNICEF, kanal laporan resmi Kota Surabaya, laporan CFCI dan *Disrupting Harm Project*, kebijakan dan dokumen resmi Pemerintah Kota Surabaya, serta hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pemberitaan dari sumber terpercaya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat, melengkapi,

dan memberikan konteks terhadap data primer yang diperoleh dari wawancara. Peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan dan validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data yang bersumber dari dokumen resmi dan literatur terkait.<sup>43</sup>

### 1.7 Argumen Pokok

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa praktik kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF dalam menangani isu OCSEA dapat dipahami sebagai bentuk paradiplomasi yang bersifat fungsional, di mana pemerintah daerah berperan aktif sebagai aktor subnasional dalam merespons persoalan global yang berdampak langsung di tingkat lokal.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, paradiplomasi dipahami sebagai strategi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama internasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pembangunan sosial, tanpa melampaui kewenangan diplomasi pemerintah pusat.

Lebih lanjut, penelitian ini menduga bahwa praktik paradiplomasi melalui kemitraan dengan UNICEF berkontribusi terhadap penguatan kapasitas Pemerintah Kota Surabaya dalam mengadaptasi agenda perlindungan anak global ke dalam kebijakan dan program lokal, dan akan diuji melalui analisis.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	PEMBAHASAN
I	PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah

<sup>43</sup> Muhammad Wahyu Ilhami Wiyanda Vera Nurfajriani, *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, 30 September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

<sup>44</sup> Noé Cornago, *On The Normalization Of Sub-State Diplomacy*, T.T.

		<p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>a. Manfaat akademis</p> <p>b. Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Teori: Paradiplomasi</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis</p> <p>1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p><b>II</b></p>	<p><b>DINAMIKA OCSEA          SEBAGAI ISU          STRATEGIS          GLOBAL,          NASIONAL, DAN          LOKAL</b></p>	<p>2.1 Memahami OCSEA sebagai Isu Global</p> <p>2.2 Potret dan Tantangan Penanganan OCSEA di Indonesia</p> <p>2.3 Dinamika OCSEA di Kota Surabaya</p> <p>2.3.1 Tren Kasus OCSEA di Kota Surabaya</p> <p>2.3.2 Modus dan Pola Umum Kejahatan OCSEA</p> <p>2.3.3 Pola Korban dan Pelaku OCSEA di Surabaya</p> <p>2.4 Upaya Internal Pemerintah Kota Surabaya Menangani OCSEA</p>

<b>III</b>	<b>PRAKTIK PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENANGANAN OCSEA</b>	3.1 Posisi Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Isu OCSEA 3.2 Proses Paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya dengan UNICEF 3.2.1 Inisiasi dan Formalisasi Kerja Sama 3.2.2 Pembagian Koordinasi Peran Aktor 3.3 Tantangan Penanganan OCSEA di Surabaya
<b>IV</b>	<b>STRATEGI PENANGANAN OCSEA DI KOTA SURABAYA</b>	4.1 Peningkatan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ) 4.2 Penguatan Kelembagaan 4.3 Pencegahan Berbasis Komunitas
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b>	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran